

Korban dari Pengguna

Menjual Harapan Palsu: Hoaks Bansos dan Krisis Etika Digital



Bernardus Agus Rukiyanto

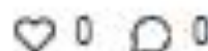
Dosen Teologi Prodi Pendidikan Keagamaan
Katolik, Universitas Sanata Dharma, Lulusan S...



Ikuti kumpulan di Google



12 April 2020 17:00 WIB - waktu baca 5 menit



Tulisan dari Bernardus Agus Rukiyanto tidak mewakili pandangan dari redaksi Kompas



Perbesar

Ilustrasi bansos. Foto: Ani Fathudin/Shutterstock

Mungkin di antara kita pernah menerima pesan WA yang sangat menggiurkan: bantuan sosial (bansos) sebesar Rp1.500.000 untuk seluruh masyarakat Indonesia, lengkap dengan tautan pendaftaran instan.

Sekilas, pesan ini tampak seperti angin segar di tengah-tengah perekonomian yang tidak menentu. Namun di balikinya, tersembunyi praktik manipulasi yang memanfaatkan harapan dan situasi orang kecil. Menurut penulis, hal ini bukan sekadar hoaks biasa, melainkan juga bentuk eksploitasi digital yang serius, bahkan bisa disebut sebagai kejahatan moral.

Fenomena hoaks bansos bukan hal baru. Namun, intensitas dan kecanggihannya meningkat seiring perkembangan teknologi digital. Narasi yang digunakan pun semakin halus: mengatasnamakan pemerintah, menyebut sebagai program resmi kementerian tertentu, dan menggunakan bahasa yang persuasif. Tujuannya jelas: menciptakan keinginan masyarakat untuk segera mengklik tautan dan menyerahkan data pribadi.

Masalahnya bukan hanya sekadar kebohongan informasi, melainkan juga kerusakan etika yang ditimbulkannya. Hoaks bansos bekerja dengan cara merampas dua hal sekaligus: harapan dan kepercayaan. Harapan dirampas karena masyarakat dijanjikan sesuatu yang tidak nyata. Kepercayaan dirusak karena institusi publik—dalam hal ini pemerintah—dijadikan tameng untuk menipu.

Eksplotasi atas Kerentanan



Ilustrasi hoaks. Foto: Shutterstock

Dalam perspektif etika sosial, tindakan ini dapat dikategorikan sebagai eksploitasi terhadap kelompok rentan. Mereka yang menjadi target utama hoaks bansos adalah masyarakat yang secara ekonomi lemah, yang mungkin sangat membutuhkan bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar. Ketika seseorang berada dalam situasi terdesak, kemampuan kritisnya sering kali melemah. Di titik inilah pelaku hoaks masuk dan memainkan perannya.

Dalam tradisi moral, tindakan semacam ini bukan hanya tidak etis, melainkan juga melanggar prinsip keadilan dan martabat manusia. Manusia diperlakukan bukan sebagai tujuan, melainkan sebagai alat—alat untuk mendapatkan keuntungan, entah melalui pencurian data, penipuan finansial, atau pun manipulasi lainnya.

Lebih jauh, hal ini menunjukkan adanya krisis empati dalam masyarakat digital kita. Teknologi yang seharusnya menjadi sarana solidaritas justru diubah menjadi instrumen penindasan baru. Kita menyaksikan bagaimana ruang digital menjadi ladang subur bagi “ekonomi kebohongan”.

Krisis Literasi Digital

Salah satu akar persoalan dari maraknya hoaks bansos adalah rendahnya literasi digital. Banyak masyarakat belum terbiasa memverifikasi informasi, membedakan sumber resmi dan tidak resmi, atau mengenali ciri-ciri penipuan digital.



Ilustrasi penipuan digital. Foto: Shutterstock

Padahal, dalam era digital, kemampuan untuk memilah informasi bukan lagi sekadar keterampilan tambahan, melainkan juga kebutuhan dasar. Tanpa itu, masyarakat akan terus menjadi korban dari arus informasi yang tidak terkendali.

Namun, menyalahkan masyarakat semata juga tidak adil. Literasi digital adalah tanggung jawab bersama: negara, lembaga pendidikan, komunitas agama, dan keluarga. Pendidikan tidak boleh hanya berhenti pada aspek kognitif, tetapi juga harus menyentuh dimensi etis dan kritis.

Tanggung Jawab Negara

Negara memiliki peran penting dalam melindungi warganya dari praktik penipuan digital. Hal ini mencakup dua hal: regulasi yang tegas dan edukasi yang masif.

Di satu sisi, pelaku penyebar hoaks bansos harus ditindak secara hukum. Tanpa penegakan hukum yang konsisten, efek jera tidak akan tercipta. Di sisi lain, pemerintah juga perlu lebih aktif dalam memberikan informasi yang jelas, transparan, dan mudah diakses terkait program-program bantuan sosial.

Ketika informasi resmi sulit diakses atau kurang dipahami, ruang kosong itu akan segera diisi oleh informasi palsu. Dalam konteks ini, komunikasi publik bukan sekadar pelengkap, melainkan juga bagian integral dari kebijakan sosial.

Perspektif Etika dan Spiritualitas

Dari sudut pandang teologis, fenomena hoaks bansos menyentuh persoalan mendasar tentang dosa sosial. Hal ini bukan hanya soal kesalahan individu, melainkan juga struktur yang memungkinkan ketidakadilan itu terus berlangsung.



Ilustrasi berbohong. Foto: Dok. Shutterstock

Dalam ajaran moral, kejujuran adalah nilai fundamental. Kebohongan—apalagi yang merugikan orang lain—merupakan pelanggaran serius terhadap relasi sosial. Lebih dari itu, menipu orang miskin adalah bentuk ketidakadilan yang berlipat ganda, karena dilakukan terhadap mereka yang seharusnya dilindungi.

Paus Fransiskus dalam berbagai kesempatan mengingatkan tentang bahaya “budaya pembuangan,” di mana manusia diperlakukan sebagai barang yang bisa dimanipulasi dan dibuang. Hoaks bansos adalah manifestasi nyata dari budaya ini dalam ruang digital.

Sebaliknya, iman mengajak kita untuk membangun “budaya perjumpaan,” di mana teknologi digunakan untuk memperkuat solidaritas, bukan merusaknya. Hal ini berarti bahwa etika digital tidak bisa dilepaskan dari spiritualitas: bagaimana kita memandang sesama sebagai saudara, bukan sebagai objek.

Peran Pendidikan dan Komunitas

Pendidikan memiliki peran strategis dalam membangun kesadaran kritis. Di sekolah, literasi digital harus diajarkan bukan hanya sebagai keterampilan teknis, melainkan juga sebagai bagian dari pendidikan karakter. Siswa perlu diajak untuk memahami implikasi moral dari setiap tindakan di ruang digital.

Komunitas agama juga memiliki tanggung jawab yang tidak kalah penting. Mimbar-mimbar keagamaan dapat menjadi ruang untuk mengedukasi umat tentang bahaya hoaks dan pentingnya kejujuran dalam kehidupan sehari-hari, termasuk di dunia maya.



Ilustrasi komunitas. Foto: Thinkstock

Lebih dari itu, komunitas dapat menjadi jaringan solidaritas yang saling mengingatkan. Ketika seseorang menerima informasi mencurigakan, hendaknya tidak langsung menyebarkannya, tetapi memverifikasi dan berdiskusi dengan komunitasnya.

Membangun Etika Digital

Menghadapi fenomena hoaks bansos tidak cukup hanya dengan klarifikasi fakta. Yang dibutuhkan adalah pembangunan etika digital yang kuat. Etika ini harus berakar pada nilai-nilai dasar: kejujuran, keadilan, tanggung jawab, dan solidaritas.

Setiap pengguna teknologi memiliki peran. Sebelum membagikan informasi, kita perlu bertanya: Apakah pesan ini benar? Apakah bermanfaat? Apakah akan merugikan orang lain? Pertanyaan-pertanyaan sederhana ini dapat menjadi *filter* moral yang efektif.

Di sisi lain, kita juga perlu mengembangkan empati digital—kemampuan untuk merasakan dampak dari tindakan kita terhadap orang lain, meskipun tidak bertatap muka. Tanpa empati, ruang digital akan terus menjadi tempat yang dingin dan penuh manipulasi.

Penutup



Ilustrasi hoaks. Foto: Shutterstock

Hoaks bansos adalah cermin dari masalah yang lebih mendalam: krisis etika di tengah kemajuan teknologi. Hal ini menunjukkan bahwa kemajuan digital tidak otomatis diikuti oleh kematangan moral.

Jika dibiarkan, praktik ini tidak hanya merugikan individu, tetapi juga merusak tatanan sosial. Kepercayaan publik akan semakin terkikis dan solidaritas akan melemah.

Karena itu, melawan hoaks bansos bukan hanya tugas pemerintah atau aparat hukum, melainkan juga tanggung jawab kita bersama. Hal ini adalah panggilan untuk membangun masyarakat digital yang lebih beradab—di mana teknologi tidak digunakan untuk menipu, tetapi untuk melayani; tidak untuk mengeksploitasi, tetapi untuk membebaskan.

Di tengah derasnya arus informasi, kita dihadapkan pada pilihan: menjadi bagian dari masalah, atau menjadi bagian dari solusi. Pilihan itu, pada akhirnya, adalah pilihan moral.

Ragam Hoaks

Penyebar Hoaks

Etika

Krisis

hoaks

Bansos

Digital

Pesan



Tim Editor ▾